BORNEO TRIBUNE

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu

Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des

20 14 Hal.: 11

1.: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

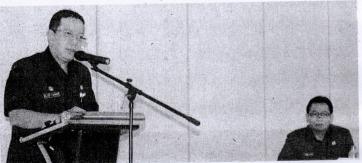
Pemprov Kalbar Bertekan Pertahankan WTP

LPJ SKPD Masih Jadi Temuan Itda Kalbar

Andika Lay Borneo Tribune, *Pontianak*

Masih banyak temuan oleh ispektorat di Dinas/Badan ilingkungan albar, menunjukan kurang ptimalnya para SKPD yang nemiliki temuan untuk meyelesaikan rekomendasi, erhadap temuan-temun ersebut, dan hingga sampai engan periode 31 Desember 013 terdapat 16 SKPD Unit erja yang memeiliki temun keuangan dari temuan ahun 2005, sampai tahun 012 sebanyak 86 temuan ebesar Rp.83.900.446.549,an sampai bulan Juni 2014, elah ditindak lanjuti dengan enyetoran sebesar Rp. .158.176.219,-, sehingga nasih tersisa sebesar Rp. 1.742.270.330,- hingga 31 esember 2014.

"Saya harap, temuan keangan Pemerintah Provinsi ialbar dapat berkurang seitar 22 persen menjadi Rp. 3.771.865.023,- dan kita arap juga temuan adminis-



Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM saat memberikan arahan kepada peserta Workshop. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

trasi Inspektorat Daerah (Itda) Provinsi Kalbar hingga 31 Desember 2014 dapat berkurang 11.5 persen, atau sebanyak 26 rekomendasi sehingga tersisa 200 temuan," kata Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM, Selasa (21/10) lalu, saat membuka Rapat Kerja dan Sosialisasi /Workshop Pengawasan ke IV dan Pemuktahiran Data Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2014 yang berlangsung di Aula Gardenia

Dikatakannya, setelah dua kali mendapatkan Penilaian Openi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI, atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalbar bertekat akan mempertahankan predikat Opini WTP tersebut, tentu diperlukan langkah-langkah.

"Dengan meningkatkan penataan administrasi keuangan di tingkat SKPD, yang mencakupi pertanggungjawaban untuk belanja barang dan jasa, masih belum sesuai dengan ktentuan seperti, pertanggungjawaban perjalanan Dinas dengan indikasi fiktif, pertanggungjawaban belanja makan minum, BBM, biaya tamu, kemahalan harga dalam pengadaan belanja barang dan jasa dan lain-lain, " jelasnya.

Laporan Keuangan SKPD
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
Kalbar yang belum menyajikan angka yang dapat yakin
kebenarannya, seperti pendapatan disebabkan
penyajian ngka pada kolom
pendapatan tidak didukung
dengan bukti pendukung
yang lengkap dan

menyakinkan.

Dijelaskannya, persediaan, disebabkan penyajian
angka persediaan tidak didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan
menyakinkan, pada kas
bendahara hingga berakhirnya tahun anggaran belum
melakukan tutup buku sehingga saldo UYHD masih
belum setor ke Kas daerah.

"Untuk mencapai tujuan bersama dalam mempertahankan predikat WTP tersebut, diperlukan kerja serta Komitmen bersama semua SKPD Pemprov Kalbar," ujar-

Diingatkannya, semua Kepala SKPD harus dapat meningkatkan penatausahaan administrasi barang milik daerah yang ada dilingkungan SKPD, salah satunya seperti pencatatan asset yang tidak lengkap, dengan tidak mencantumkan alamat yang jelas, serta nilai dan luas yang tidak didukung mngenai keberadaan dan keadaan asset yang tersebut.

"Masih ada terdapat aset pemerintah yang dikuasai pihak ketiga, namun tidak diikuti dengan perjanjian yang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti penguasaan aset daerah kendaraan dan rumah dinas," ingatnya.